Vol.3, No.1, 30 April 2024 (hal: 64-86)

e-ISSN: 2829-6036 p-ISSN: 2829-565X

Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society

Availabel Online: https://j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS

Moderasi Beragama di Indonesia: Membangun Toleransi & Kerukunan dalam Masyarakat Pluralis

Religious Moderation in Indonesia: Building Tolerance and Harmony in a Pluralist Society

Naurah Luthfiah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Corresponding author: naurah.luthfiah@uinsu.ac.id

Abstrak

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, Indonesia merupakan negara yang hidup dengan keanekaragaman budaya, agama, dan suku bangsa, menghadapi tantangan yang kompleks dalam menjaga harmoni dan kerukunan dalam masyarakatnya yang pluralis. Keberagaman tersebut memiliki potensi untuk menjadi sumber kekayaan dan kekuatan, namun juga memiliki potensi untuk menimbulkan gesekan dan konflik jika tidak dikelola dengan bijak. Oleh karena itulah, penting untuk mengenal dan memahami peran moderasi beragama dalam membangun toleransi dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat yang beragam ini. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai moderasi beragama, dan gambaran pelaksanaannya di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjalani moderasi beragama serta bagaimana lembaga pendidikan menjadi sentral bagi pengenalan moderasi beragama bagi generasi-generasi muda saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah library research (studi kepustakaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki peranan penting dalam membangun dan mempertahankan toleransi serta kerukunan antara berbagai kelompok agama dan kepercayaan. Tulisan ini telah mengupas secara mendalam mengenai pentingnya moderasi beragama sebagai landasan utama dalam mencapai tujuan tersebut. Moderasi beragama melibatkan pendekatan yang seimbang dan berkeadilan terhadap prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai budaya, sambil menghormati hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Dengan mengadopsi pandangan ini, masyarakat dapat menghindari ekstremisme dan intoleransi yang dapat merusak harmoni sosial. Salah satu kunci dari moderasi beragama adalah pendidikan yang inklusif dan berfokus pada nilai-nilai persamaan, menghargai perbedaan, dan promosi dialog antaragama. Pendidikan semacam ini akan membentuk generasi muda yang lebih terbuka pikirannya, mampu mengenali nilai-nilai bersama, dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai agama-agama lain. Saran berkaitan dengan fokus penelitian yang dapat lebih diperluas lagi oleh peneliti berikutnya dikarenakan moderasi beragama sangat pembahasannya.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Indonesia, Toleransi, Kerukunan, Masyarakat Pluralis



Vol.3, No.1, 30 April 2024 (hal: 64-86)

e-ISSN: 2829-6036 p-ISSN: 2829-565X **Book Chapter of Proceedings**

Journey-Liaison Academia and Society

Availabel Online: https://j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS

Abstract

In the era of globalization and advances in information technology, Indonesia is a country that lives with cultural, religious and ethnic diversity, facing complex challenges in maintaining harmony and harmony in its pluralist society. This diversity has the potential to become a source of wealth and strength, but it also has the potential to cause friction and conflict if not managed wisely. Therefore, it is important to recognize and understand the role of religious moderation in building tolerance and harmony in the midst of this diverse society. This paper aims to examine religious moderation, and an overview of its implementation in Indonesia, as well as the challenges and opportunities faced in undergoing religious moderation and how educational institutions are central to the introduction of religious moderation for today's young generations. The research method used in this paper is library research. The results of the study show that religious moderation has an important role in building and maintaining tolerance and harmony between various religious and belief groups. This paper has explored in depth the importance of religious moderation as the main foundation in achieving this goal. Religious moderation involves a balanced and fair approach to religious principles and cultural values, while respecting human rights and freedom of religion. By adopting this view, society can avoid extremism and intolerance that can undermine social harmony. One of the keys to religious moderation is education that is inclusive and focuses on values of equality, respect for differences, and the promotion of interfaith dialogue. This kind of education will form a younger generation who are more open-minded, able to recognize shared values, and have a deeper understanding of other religions. Suggestions related to research focus which can be further expanded by subsequent researchers because religious moderation is very broad in scope of discussion.

Keyword: Religious Moderation, Indonesia, Tolerance, Harmony, Pluralist Socie

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya, agama, dan etnis, yang dihadapkan pada tantangan yang rumit dalam menjaga keselarasan dan persatuan dan jumlah populasi yang beragam. Keberagaman tersebut memiliki potensi untuk menjadi sumber kekayaan dan kekuatan, namun juga memiliki potensi untuk menimbulkan gesekan dan konflik jika tidak dikelola dengan bijak. Oleh karena itulah, penting untuk mengenal dan memahami peran moderasi beragama dalam membangun toleransi dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat yang beragam ini.

Moderasi beragama secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan dalam beragama yang menekankan pada sikap tenggang rasa, penghargaan terhadap perbedaan yang ada, serta mendukung dialog antaragama. Moderasi beragama berusaha mendorong untuk mampu memahami dan menerima bahwa setiap agama memiliki nilai-nilai universal yang didalamnya mengajarkan cinta, perdamaian, dan kebaikan. Di Indonesia, walaupun penduduknya menganut agama Islam, namun juga diharuskan untuk hidup berdampingan dengan agama-agama lainnya, sehingga moderasi beragama merupakan sebuah keharusan dan kehadirannya memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan dan kedamaian sosial.

Pelaksanaan moderasi dalam berbagai aspek kehidupan merupakan langkah yang penting dan harus diterapkan, dengan tujuan menghindari perilaku ekstrem dan mendorong sikap positif dalam masyarakat yang beragam agama. Pendekatan moderasi agama memiliki peran penting dalam mencegah dan mengatasi konflik serta klaim absolut, subjektivitas, dan penolakan yang dogmatis terhadap keyakinan agama. Selain itu, ini juga merupakan upaya untuk melawan radikalisme dan pandangan sekuler. Prinsip utama dari moderasi agama adalah memupuk sikap toleransi sebagai cara terbaik untuk menangani pandangan yang absolut dalam agama, serta menyikapi sektarianisme yang dapat mengganggu harmoni dalam kehidupan beragama. Pemahaman ini penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan negara. [1]

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai moderasi beragama, dan gambaran pelaksanaannya di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjalani moderasi beragama serta bagaimana lembaga pendidikan menjadi sentral bagi pengenalan moderasi beragama bagi generasi-generasi muda saat ini.

Melalui pemahaman yang baik dan mendalam mengenai moderasi beragama, diharapkan jurnal ini dapat memberikan wawasan baru bagi pembaca mengenai bagaimana membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai kebhinekaan. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama menghadapi tantangan-tantangan multikulturalisme dalam rangka membangun Indonesia yang semakin kuat dan bersatu di tengah-tengah perbedaan dan keberagaman yang ada di bumi Indonesia tercinta ini.

METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi pustaka atau *library research*. Dalam pendekatan *library research*, peneliti berinteraksi intensif dengan sumber-sumber seperti buku, arsip, dokumen, jurnal, catatan, dokumentasi, surat, dan lainnya.[2] Pendekatan studi pustaka melibatkan eksplorasi dan analisis mendalam terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diinvestigasi.[3]

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Moderasi Beragama

Menurut etimologi, kata "moderasi" berasal dari istilah dalam bahasa Latin yaitu "moderatio" yang mengandung makna kesederhanaan, yaitu tidak berlebihan atau terlalu minim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dua pengertian untuk istilah moderasi, yaitu: (1) pengurangan kekerasan; (2) menghindari ekstremisme. Dengan kata lain, moderasi dapat diartikan sebagai "sikap moderat" yang mencerminkan keseimbangan, ketidak-ekstremisan, dan keteraturan.

Dalam konteks Bahasa Inggris, istilah "moderation" sering mengacu pada arti rata-rata, inti, standar, atau netral. Dalam konteks bahasa, moderasi secara umum mengacu pada penekanan terhadap keseimbangan dalam keyakinan, moral, kepribadian, dan tindakan, baik dalam hubungan dengan orang lain maupun dalam kaitannya dengan masyarakat atau institusi pemerintahan.[4]

Dalam Bahasa Arab, konsep moderasi berasal dari kata "wasath" atau "wasathiyah" yang memiliki arti "tengah-tengah". Semua varian kata tersebut merujuk pada "pilihan terbaik". Seseorang yang bersikap moderat berada pada tengah-tengah atau netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, sering disebut sebagai "wasith". Dalam konteks ini, "wasith" memiliki arti tiga hal, yakni: 1) penengah atau mediator dalam perselisihan; 2) pihak yang menenangkan atau memprioritaskan perdamaian di antara pihak-pihak yang berselisih atau terlibat dalam konflik; dan 3) pemimpin dalam sebuah pertandingan. Oleh karena itu, seorang "wasith" harus memiliki sifat netral, adil, dan seimbang serta tidak memihak pada satu pihak. Melalui pendekatan yang adil dan seimbang ini, "wasith mampu membuat keputusan yang terbaik.

Dalam konteks Bahasa Arab, konsep "wasath" juga mengandung makna "semua yang baik sesuai dengan tujuan dan proporsinya". Sebagai contoh, sikap "dermawan" berarti bertindak dengan keseimbangan antara keborosan dan kikir. Demikian pula, kata "pemberani" mencerminkan sikap yang seimbang antara penakut (al-jubn) dan nekat tanpa pertimbangan (tahawur).

Sebagai lawan kata (antonim), moderasi bertentangan dengan "berlebihan" (dalam Bahasa Arab: *tatharruf*). *Tatharruf* merujuk pada arti ekstrem, radikal, dan berlebihan. Dalam Bahasa Inggris, kata "extreme" dapat diartikan sebagai tindakan berlebihan, melampaui batas, mencapai ujung ekstrem, atau mengambil

pendekatan yang ekstrem. Dalam Bahasa Indonesia, istilah "ekstrem" memiliki makna sebagai "titik paling ujung, paling tinggi, atau paling keras". Konsep ini serupa dengan makna "wasath" dalam Bahasa Arab, di mana moderasi mencerminkan pergerakan dari tepi menuju ke pusat atau sumbu (centripetal), sedangkan ekstremisme mencerminkan pergerakan menjauhi pusat atau sumbu, menuju bagian terluar dan ekstrem (centrifugal), seperti gerakan bandul jam yang bergerak menuju pusat.[6]

Dalam konteks Bahasa Sanskerta, "agama" dapat diarkan sebagai "tidak bingung/tidak kacau" (a = tidak, gama = bingung/kacau). Ini menggambarkan tujuan agama untuk membimbing manusia ke arah yang terarah dan terorganisir, serta mencegah kebingungan. Secara esensial, keberadaan agama bertujuan untuk menenangkan manusia dari dorongan-dorongan berlebihan, seperti ambisi ekstrem terhadap kekayaan dan kekuasaan, yang dapat memicu kekacauan dan konflik. Hal ini sesuai dengan tujuan agama yang dijalankan oleh Nabi dan Rasul, yakni memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, serta perlindungan bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam menghadapi akhirat.[4]

Karena itulah, agama bukan hanya terbatas pada sebuah sistem kepercayaan yang berfokus kepada iman semata. Namun lebih dari itu, agama juga merupakan sebuah sistem nilai dan sistem hidup yang didalamnya terdapat aturan untuk manusia dalam menjalani kehidupannya agar dapat menemukan kebahagiaan dan juga keselamatan.[4] Sebagaimana yang disampaikan oleh Syahidin, dkk., bahwa agama adalah suatu kerangka nilai yang diterima dan diyakini sebagai kebenaran yang akan mengarahkan manusia menuju keselamatan dalam menjalani kehidupan. Dalam konteks ini, agama terdiri dari tiga prinsip utama, yakni: (1) Sistem keyakinan atau kredo (credial); (2) Rangkaian ibadah atau upacara ritual keagamaan, dan (3) Kumpulan aturan, yang didalamnya melibatkan norma-norma dan pedoman dalam menjalani hidup, yang lebih dikenal sebagai etika.[7]

Oleh karena itu, kita dapat bersama-sama memahami bahwa moderasi dalam agama adalah suatu cara berpikir, cara bertindak, dan cara bersikap yang selalu berada di tengah-tengah, berpegang pada prinsip keadilan, dan menghindari ekstremisme dalam melaksanakan keyakinan agama. Bahkan, lebih jauh dari pada itu, moderasi juga melibatkan empati terhadap sesama manusia dan makhluk hidup lain, mengakui persamaan hak di mata hukum, tidak menyebabkan gesekan atau konflik, serta berupaya menjaga kedamaian.

Dalam hal ini, kita dapat memahami pentingnya keseimbangan antara pelaksanaan agama dan menghormati praktik keagamaan individu lain yang memiliki keyakinan berbeda. Pendekatan ini diadopsi untuk mencegah perkembangan dari sikap fanatik dan menolak kebenaran yang datang dari pandangan orang lain, dengan demikian menghindari sikap yang merasa eksklusif. Implementasi prinsip moderasi dalam agama ini melambangkan suatu titik tengah yang dapat menghubungkan dua kelompok ekstrem dalam konteks keagamaan,

Yaitu pihak yang sangat konservatif atau sering dikenal dengan sebutan ekstrem kanan, dan kelompok yang lebih fleksibel atau kerap diidentifikasi sebagai ekstrem kiri.[8]

Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan moderasi yaitu: وَكَذْلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۖ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا اللَّهِ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيَعْلَمُ مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اللَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيْعَ لِيُمَانَكُمْ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya:

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyianyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. (QS. Al-Baqarah[2]: 143)[9]

Dalam tulisan Abrar M. Dawud Faza, dijelaskan oleh Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin asy-Suyuthi bahwa dalam kalimat "wakazalika ja'alnakum" (demikian pula Kami telah menjadikan kamu), penggunaan kata "kum" dalam konteks ini merujuk kepada umat Nabi Muhammad Saw. Di sisi lain, menurut Imam ath-Thabari dalam Tafsir ath-Thabari "Jamiul Bayan 'an Takwili Qur'an", pada ayat tersebut kata "wasatha" memiliki arti "udullan" (melaksanakan dengan adil) dan "khiyaran" (memilih). Pandangan serupa diungkapkan oleh az-Zijaz dan Muhammad Ali ash-Shabuni, yang mengindikasikan bahwa makna kata "wasatha" adalah "udullan" dan "khiyaran", sebagaimana dalam penggunaannya dalam Surah Al-Qalam: 28.

Muhammad Ali ash-Shabuni juga mengemukakan dalam tafsirnya bahwa hal ini sejalan dengan pandangan yang juga diungkapkan oleh al-Jauhari dan al-Akhfas. Menurut Imam Ibnu Katsir, kata "wasatha" dalam konteks ini mengacu pada "khiyaran" (pilihan) dan "awjudan" (indah, bagus, cantik, elok), seperti pada kalimat "Quraiys Awsatul Araby Nisaban" (Suku Quraisy adalah keturunan yang baik).

Kata "wasatha" terdiri dari tiga huruf, yaitu "waw," "sin," dan "tha," dengan berbagai makna yang memberikan pujian tergantung pada susunan huruf-huruf tersebut, termasuk "wathasa," "sawatha," "thawasa," dan bentuk lain yang bisa mencapai sebelas variasi. Maknanya mengacu pada keadilan atau kesetaraan di

antara dua ujungnya. Kata-kata yang membentuk dengan kombinasi huruf ini membawa makna yang positif, indah, kuat, dan terhormat. Posisi "wasatha" dalam ayat tersebut tidak hanya berkaitan dengan tidak memihak pada satu pihak saja, tetapi juga menunjukkan pentingnya melihat seseorang dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga menjadi teladan bagi semua pihak. Posisi ini memungkinkan orang tersebut untuk mengamati siapapun dan dari manapun yang berada di sekitarnya.[8]

Banyak riwayat dari Nabi Muhammad Saw. yang menunjukkan pedoman wasathiyah (moderasi) dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam ucapan, tindakan, dan keputusan beliau. Salah satu contohnya adalah hadis yang melarang membujang, yang merupakan salah satu di antara banyak hadis yang menegaskan hal tersebut.

Artinya:

Dan telah menceritakan kepadaku Abu Imran Muhammad bin Ja'far bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab ia berkata. Saya mendengar Sa'd berkata, Utsman bin Mazh'un pernah dilarang untuk membujang selamanya, karena semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah. Andaikata beliau mengizinkannya, tentulah kami sudah mengebiri diri kami sendiri. (HR. Muslim No. 2489)[10]

Keinginan untuk menjalani kehidupan membujang dan mengebiri diri sendiri adalah tindakan yang tidak dianjurkan, meskipun mendasarkannya pada tujuan beribadah kepada Allah Swt. Tindakan ini menggambarkan ketidakseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, mengingat pentingnya juga untuk meneruskan keturunan, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Saw. tentang memperbanyak umat Islam. Dalam hadis lain, Rasulullah Saw. mengingatkan umatnya untuk menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan agama, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau.

Artinya:

Rasulullah Saw. bersabda: "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama". (HR. Nasa'i No. 3007)[11]

Dengan demikian, ucapan, tindakan, dan ketetapan Nabi Muhammad Saw. mengenai prinsip perilaku moderat tercermin dalam berbagai keputusan untuk mengambil jalan pertengahan dalam berbagai aspek kehidupan dunia maupun agama. Masih banyak hadis-hadis lainnya yang menggambarkan mengenai ajaran Islam untuk menghargai keberagaman dengan standar yang seimbang, tanpa

memberatkan atau meremehkan agama, karena keduanya dianggap sebagai tindakan yang tidak diinginkan. Intinya, sebaik-baik perkara adalah yang ditengahtengah.[12]

B. Gambaran Moderasi Beragama di Indonesia

Salah satu aspek penting dari moderasi beragama dalam konteks keindonesiaan adalah mengingat fakta bahwa masyarakat Indonesia memiliki ciri khas yang sangat beragam dan multikultural. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, etnis, bahasa, keyakinan agama, dan warisan agama. Keadaan ini menunjukkan bahwa keanekaragaman ini perlu diterima dengan baik oleh seluruh warga negara Indonesia. Namun, kita tidak dapat mengabaikan bahwa dalam situasi ini, sangat mungkin menyebabkan timbulnya gesekan bahkan konflik dari berbagai kelompok masyarakat jika keberagaman ini tidak diterima dan dipahami dengan baik sebagai sebuah bagian dari Indonesia itu sendiri.

Dalam upaya menjaga harmoni dan mencegah potensi konflik, terutama yang berhubungan dengan perbedaan dalam menginterpretasikan agama, moderasi beragama hadir sebagai solusi yang dapat menghubungkan setiap perbedaan menuju rekonsiliasi. Moderasi beragama berfungsi sebagai jembatan penghubung untuk mengatasi ketegangan antar individu atau kelompok agar tetap berada pada titik tengah yang seimbang. Upaya menjaga keseimbangan ini harus ditegakkan secara konsisten oleh semua pihak untuk menghindari pergeseran ke arah tindakan ekstrem, baik itu ekstrem kiri maupun ekstrem kanan.

Apabila dilihat dari perspektif hukum alam atau *sunnatullah*, tampaknya keberagaman adalah bagian dari kenyataan yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Penting untuk diingat bahwa semua entitas di dunia ini diciptakan oleh Allah Swt. dalam bentuk yang saling berpasang-pasangan yang saling melengkapi. Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam memahami makna keberagaman ini. Salah satunya terdapat dalam QS. al-Hujurat[49]: 13.[13]

Artinya:

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti (QS. al-Hujurat[49]: 13)[9]

Sebagai bangsa dengan pluralitas dan keragaman budaya, Indonesia telah berhasil dalam menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Prestasi ini pernah disinggung oleh Hasan Hanafi, seorang pemikir Islam dari Mesir, saat mengunjungi Indonesia dan beliau mengemukakan bahwa Indonesia, khususnya dalam pemahaman Islam, dapat menjadi "jembatan peradaban" antara dunia Islam dan Barat.[13]

Indonesia diakui sebagai contoh global karena mampu mengelola seluruh keberagaman yang ada dengan baik. Kehidupan bersama dalam konteks pemahaman moderasi beragama menjadi bagian integral dari pengalaman berbangsa. Dari sudut pandang akademis, konsep moderasi beragama, terutama dalam kerangka moderasi Islam, memiliki legitimasi dalam berbagai bidang, seperti sejarah, sosial, hukum, dan ajaran Islam itu sendiri.

Pertama, legitimasi sejarah. Penyebaran agama Islam di Indonesia jarang melibatkan kekerasan sebagai cara untuk mendapatkan penganut baru. Penerapan ajaran Islam juga cenderung menghindari praktik ekstremisme. Keanekaragaman kelompok keagamaan di berbagai agama mencerminkan sifat moderat yang telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu, khususnya dalam aspek agama. Konsep moderasi Islam di Indonesia memiliki akar dalam sejarah dengan ajaran Islam yang selalu berpadu dengan budaya lokal, seperti budaya Jawa, Minangkabau, Sunda, Bugis, Banjar, dan lainnya. Semua bentuk ekspresi keagamaan ini menggambarkan semangat moderat dengan mencari harmoni antara Islam dan budaya setempat.

Kedua, realitas sosiologis. Keragaman masyarakat Indonesia menuntut pendekatan beragama yang menghargai keberagaman pandangan. Ini menghasilkan kesadaran bahwa ada berbagai bentuk agama, etis, dan juga keyakinan. Faktor ini telah mendorong perkembangan kesadaran berbangsa yang lebih baik dari generasi sebelumnya.

Ketiga, dalam proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para pendiri bangsa berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjamin kebebasan dalam menjalankan agama. Hal ini tercermin dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Kebebasan Beragama, di mana negara diakui sebagai negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin hak setiap warga untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Jaminan ini memastikan bahwa tidak ada penindasan terhadap keyakinan agama dalam ranah publik yang mengganggu kebebasan agama lainnya.

Keempat, sumber legitimasi lainnya berasal dari ajaran Islam itu sendiri dan perilaku ulama. Islam dipahami sebagai agama yang menganjurkan moderasi, seperti yang ditegaskan dalam QS. al-Qashas[28]: 77.[13]

Artinya:

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan

Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (QS. al-Qashas[28]: 77)[9]

Ayat ini menghimbau manusia untuk mencapai derajat kesalehan, sambil tetap memperhatikan kehidupan dunia. Keseimbangan antara dimensi duniawi dan dimensi spiritual perlu dijaga. Karakteristik ini adalah ciri khas yang perlu ditanamkan dalam diri umat manusia sebagai *ummatan wasathon*.

Pluralisme memiliki akar historis yang dalam kuat dalam budaya Indonesia, menjadi sebuah realitas integral yang tak terpisahkan dari identitasnya. Ini juga memperkuat pandangan bahwa Indonesia adalah pusat keberagaman dunia. Pancasila sebagai landasan negara adalah pilar utama dalam mencapai harmoni dalam kehidupan bersama, khususnya dalam menyatukan dimensi agama dan budaya bangsa Indonesia. Hubungan antara agama dan budaya dikelola dengan baik dalam kerangka keragaman, menggabungkan perbedaan dalam satu kesatuan yang disebut Indonesia.

Dalam menafsirkan pluralisme agama dalam konteks keragaman nasional, penting untuk diingat bahwa pluralisme bukan berarti menyamakan semua agama. Lebih tepatnya, pluralisme mengartikan bahwa masyarakat yang beragam memiliki kesadaran menerima kenyataan bahwa perbedaan keyakinan adalah bagian dari kehidupan, budaya, dan identitas mereka. Pandangan ini menegaskan bahwa semua warga negara dalam masyarakat yang beragam memiliki tanggung jawab untuk mengakui dan merangkul perbedaan dan keberagaman sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. Pluralisme adalah prasyarat penting untuk memupuk persaturan dalam kerangka kebangsaan. Sehingga hal ini akan menolak segala bentuk ketidakterimaan terhadap keberagaman yang ada.

Dalam mengimplementasikan sikap toleransi dalam agama, terutama dalam menghadapi perbedaan keyakinan, perlu usaha yang berkelanjutan untuk mewujudkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pengembangan sikap yang tepat.[13] Beberapa tindakan yang dapat diambil, meliputi:

- 1. Berusaha memahami kebenaran dalam ajaran agama lain.
- 2. Meredam perbedaan dalam agama-agama.
- 3. Menyoroti persamaan dalam agama-agama.
- 4. Membangun rasa persaudaraan.
- 5. Fokus pada pembinaan individu dan masyarakat sesuai dengan tujuan agama-ama monoteistik.
- 6. Memprioritaskan pelaksanaan ajaran-ajaran yang mengedepankan tolerasi agama.
- 7. Menjauhi praktik saling serang antar penganut agama.[14] Kehadiran Islam di Indonesia bukanlah untuk memusuhi budaya yang sudah

mengakar dan dipegang oleh masyarakat Indonesia sebelum Islam datang. Islam hadir di Indonesia tanpa menghancurkan budaya yang telah ada dan dipegang oleh masyarakat sebelumnya. Dalam penyebarannya, Islam tidak menggunakan kekerasan, tetapi membawa kedamaian. Kepribadian lembut Islam ini memudahkan penerimaan agama ini oleh masyarakat Indonesia saat itu.

Para pendahulu kita telah menunjukkan praktik moderasi beragama, yang menjadi contoh untuk kita saat ini. Mereka menjalankan dakwah dengan cara yang damai. Dakwah mereka dilakukan dengan tujuan menyebarkan kebenaran, mengajak kebaikan, dan menjauhi keburukan. Ketulusan dalam dakwah ini memungkinkan Islam diterima oleh masyarakat, juga karena fokus utama Islam adalah substansi ajaran, bukan motif politik atau bisnis.

Selama proses penyebarannya, dakwah Islam bertemu dengan ajaran Hindu dan Buddha, namun mampu bergerak tanpa saling mengarah kepada konflik. Keharmonisan ini membentuk sikap yang saling menghormati terhadap keragaman di antara pemeluk agama di Indonesia hingga saat ini.

Sebagai negara yang beraneka ragam, Indonesia menganut nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Dari wilayah Sabang sampai Merauke, berbagai suku, agama, tradisi, bahasa, dan unsur lainnya berkumpul dengan beragam perbedaan yang memiliki kekhasannya masing-masing, dan Indonesia berperan sebagai wadah yang menyatukan berbagai keberagaman ini. Pluralisme etnis, suku, dan agama menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional. Kemajemukan ini menjadi aset berharga jika diartikan dengan benar oleh semua pihak.[13]

C. Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Budaya dan Masyarakat Indonesia

Semboyan yang dimiliki oleh Indonesia tertera pada lambang negara, yaitu yang berada pada pita di kaki burung Garuda Pancasila, yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini juga dijelaskan dalam Pasal 36A UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika". Bhinneka Tunggal Ika adalah istilah yang diambil dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular, yang berasal dari masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari Bahasa Jawa Kuno yang mengartikan "berbeda-beda tetapi tetap satu". Kata "Bhinneka" digunakan untuk merujuk pada keberagaman masyarakat Indonesia yang mencakup berbagai suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Sedangkan, "Tunggal Ika" menggambarkan kesatuan dari keragaman ini. Kesatuan ini menjadi cita-cita bangsa Indonesia yang menjadikan perbedaan dan keragaman terjalin dalam satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[15]

Kitab Sutasoma sendiri didalamnya mengajarkan mengenai toleransi beragama, yang menunjukkan adanya kerukunan dan perdamaian antara penganut agama Hindu dan penganut agama Buddaha yang dahulu berada salam satu naungan Kerajaan Majapahit. Agama Hindu dipercaya sebagai agama yang masuk pertama kali ke Indonesia, disusul dengan agama Buddha. Kedua agama ini hidup berdampingan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Dalam Kitab Sutasoma ini pula dijelaskan bahwa agama Hindu dan Buddha walaupun berbeda, namun dapat hidup bersama-sama dan tidak menimbulkan perpecahan didalamnya. Istilah "Bhinneka Tunggal Ika" yang semula digunakan untuk menggambarkan semangat toleransi beragama pada Masa Majapahit, lalu diangkat menjadi semboyan bagi Bangsa Indonesia.

Sebagai sebuah semboyan, tentu konteks permasalahannya tidak hanya berkaitan dengan toleransi beragama saja, namun lebih jauh lagi yaitu berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Sebagai sebuah bangsa yang majemuk, maka bangsa Indonesia memiliki potensi perpecahan yang juga tinggi. Sehingga sikap toleran sangat diperlukan demi mewujudkan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang ada. Dengan demikian, toleransi akan menciptakan kehidupan yang damai dan juga tenteram serta sikap saling menghargai dan menghormati antar masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[15]

Perilaku toleransi dalam suku, agama, ras, dan budaya, dapat diwujudkan melalui beberapa hal, yaitu:

1. Toleransi dalam keberagaman agama

Dalam Sila Pertama Pancasila, dengan jelas dinyatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang berarti bahwa Indonesia adalah negara dengan prinsip ketuhanan dan menghendaki warganya untuk menganut agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Saat ini terdapat enam agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Perbedaan ini seharusnya tidak menjadi bahan perdebatan atau alasan untuk mendiskriminasi.

Setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk memeluk agama sesuai keyakinannya, dan negara bertanggung jawab untuk menjaminnya. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2, yang menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya." Sikap dan perilaku toleransi dalam beragama dapat diwujudkan dengan:

- a) Menghormati kebebasan orang lain untuk memilih agama yang mereka anut.
- b) Menghargai dan menghormati agama yang dianut oleh orang lain.
- c) Tidak mengganggu ibadah atau kegiatan keagamaan orang lain.
- d) Tidak mencela atau merendahkan agama orang lain.
- 2. Toleransi dalam keberagaman suku

Indonesia terdiri dari beragam suku yang masing-masing tentu memiliki perbedaan budaya. Dalam menjaga perdamaian dan keharmonisan antar

suku, tidak seharusnya suatu suku merasa lebih baik dari suku yang lain sehingga merasa memiliki hak untuk merendahkan dan menghinakan suku yang lain. Contoh sikap dan perilaku toleran dalam menjalani dan menghargai keberagaman suku yang ada adalah dengan cara:

- a) Menghormati dan menghargai suku lain.
- b) Memperlakukan setiap orang dengan baik tanpa memandang perbedaan suku.
- c) Tidak mendeskriminasi suku tertentu.
- 3. Toleransi dalam keberagaman sosial budaya

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman sosial dan budaya harus mampu menjaga dan mempertahankan keberagaman sosial dan budaya yang ada. Contoh sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga keberagaman sosial dan budaya adalah dengan cara:

- a) Menghargai perbedaan budaya.
- b) Mempelajari keberagaman budaya di Indonesia.
- c) Mencintai budaya-budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.[15]

Dalam tulisan berbeda disampaikan, bahwa nilai-nilai moderasi beragama dalam budaya dan masyarakat Indonesia dapat dirincikan pada beberapa indikator, diantaranya:

1) Komitmen Kebangsaan

Ada beberapa indikator utama yang perlu dipertimbangkan dalam usaha mengevaluasi sejauh mana individu atau kelompok telah mengadopsi Pancasila sebagai landasan dan pedoman negara, termasuk dalam pandangan dan ekspresi keagamaan mereka. Ketika menghadapi situasi seperti saat ini, dimana pertanyaan mengenai komitmen kepada negara menjadi sangat relevan, terutama kita berkaitan dengan munculnya pandangan keagamaan baru yang tidak selaras dengan nilai-nilai dan tradisi yang telah membentuk dasar negara ini. Membentuk sudut pandang keagamaan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan tradisi nasional dapat menghasilkan pemahaman yang saling bertentangan dan memicu perbandingan antara ajaran agama dan masyarakat, menciptakan kesan konflik. Memandang bahwa ajaran agama tidak memiliki peran dalam memupuk semangat persatuan nasional adalah tindakan yang kurang sesuai dan juga kurang bijaksana.

Ketika ideologi keagamaan transnasional baru muncul, yang mengarah pada ambisi menciptakan sistem negara yang tidak lagi bergantung pada konsep negara-bangsa tradisional, tetapi lebih berfokus pada kepemimpinan global dan cenderung mengabaikan kedaulatan negara, maka pentingnya komitmen terhadap bangsa semakin menonjol. Keutuhan Indonesia sebagai bangsa pasti terancam apabila narasi-narasi semacam ini menyebar dan diterima oleh masyarakat secara luas. Oleh

karena itu, moderasi beragama diartikan sebagai upaya untuk memelihara agar masyarakat tidak bergerak menjauh dari nilai-nilai agama yang moderat, sehingga menjaga agar mereka tidak menjadi masyarakat yang menjauh dari esensi nilai-nilai tersebut.

2) Toleransi

Toleransi merupakan sikap yang bersedia memberikan kebebasan kepada individu lain untuk berpikir, berbicara, dan memiliki sudut pandang yang berbeda dari pandangan kita sendiri, tanpa mengganggu hak-hak mereka. Toleransi dibangun atas dasar keterbukaan dalam berpikir. Toleransi juga mencakup sikap penerimaan, penghargaan terhadap perbedaan, dan pemahaman yang positif terhadap individu lain.

Demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan di Indonesia sangat tergantung pada sikap toleransi dalam menghadapi berbagai perbedaan yang timbul akibat keberagaman. Agar demokrasi dapat diterapkan secara efisien, masyarakat perlu memiliki sensitivitas terhadap berbagai jenis perbedaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi bukan hanya terkait dengan agama, melainkan juga menyangkut aspek seperti ras, gender, keragaman budaya, dan lainnya.

3) Anti Radikalisme dan Kekerasan

Akibat dari pandangan agama yang cenderung ekstrem, muncul kecenderungan untuk mengembangkan ekstremisme dan kekerasan atas nama agama. Ideologi dan pengetahuan ini pada akhirnya mendorong pengikutnya untuk menginginkan perubahan sosial dan politik melalui tindakan kekerasan, seperti yang diyakini oleh para penganutnya. Ini tidak hanya menghasilkan kekerasan fisik yang timbul dari ekspresi keagamaan yang ekstrem, tetapi juga termasuk bentuk kekerasan nonfisik seperti tuduhan tanpa dasar teologis yang valid dan penolakan atas pemikiran yang dianggap sesat.

Pada dasarnya, keyakinan agama, terutama dalam Islam, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Islam hadir di dunia sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia (rahmatan lil 'alamin). Namun, sikap kaku dan eksklusivisme dalam beberapa aliran agama seringkali menciptakan persepsi di kalangan non-Muslim bahwa wajah Islam mencerminkan rasa takut atau bahkan ancaman. Citra Islam dalam diskusi publik seringkali dianggap sebagai agama yang keras dan radikal. Pandangan bahwa Islam tidak memiliki kasih sayang adalah sebuah kesalahpahaman yang merendahkan, mengingat tujuan agama Islam adalah untuk menyebarkan rahmat ke seluruh penjuru dunia.

Pandangan negatif ini seringkali mengkomplekskan upaya membangun harmoni dalam masyarakat. Ini adalah pandangan yang diupayakan oleh beberapa kelompok radikal dan ekstremis. Kelompok-kelompok ini didominasi oleh rasa benci yang kuat terhadap pandangan yang berbeda, dan mereka mungkin akan semakin cenderung menolak komunitas agama yang menghormati dan menerima perbedaan agama. Oleh karena itu, dalam konteks ini, moderasi keagamaan menjadi pilihan yang diutamakan dalam mengadopsi sikap dan ekspresi keagamaan yang seimbang dan adil, yang menitikberatkan pada keadilan, penghargaan, dan kesadaran tentang realitas disparitas sosial.

4) Akomodatif Terhadap Budaya Lokal

Sangat jarang terjadi perseteruan yang berkepanjangan saat agama, khususnya Islam dan budaya berpadu. Budaya merupakan buah pemikiran manusia, yang bisa diubah sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia, sedangkan agama berlandaskan pada wahyu illahi. Hubungan antara agama dan budaya seringkali memiliki sifat ambigu. Ketika berbicara tentang agama, terutama Islam, sering kali muncul kontradiksi saat ini.

Namun, melalui pendekatan fiqh, perbedaan teologis bisa dipertemukan dengan tradisi lokal dalam Islam. Usaha ijtihad oleh ulama menghasilkan pandangan hukum (fiqh) yang dapat berperan dalam meredakan ketegangan. Prinsip-prinsip ajaran Islam dan tradisi lokal bisa diperdamaikan dengan menggunakan kaidah-kaidah dalam fiqh dan ushul fiqh, seperti *al-'adatu muhakkamah* (adat istiadat dapat menjadi sumber hukum). Prinsip-prinsip fiqh tersebut menjadi dasar untuk memahami keragaman tradisi dan ajaran Islam, yang di satu sisi mungkin tidak memiliki dasar hukum tekstual, tetapi memiliki keberadaan adat di sisi lain.[16]

D. Tantangan dan Peluang dalam Menerapkan Moderasi Beragama di Tengah Dinamika Sosial dan Politik di Indonesia

1. Tantangan Penerapan Moderasi Beragama di Indonesia

Banyak tantangan dalam menerapkan moderasi beragama di Indonesia. Tantangan-tantangan ini terdiri dari yang bersifat lunak hingga yang keras. Mulai dari pemahaman, sikap hingga gerakan keagamaan. Secara umum, sejumlah tantangan pengembangan moderasi beragama antara lain:

- a. Masih kuatnya pandangan yang bersifat *pejoratif* (merendahkan) yang muncul akibat kesalahan persepsi terhadap moderasi beragama. Kalangan moderat–yang karena sikapnya berada di tengah-tengah–sering kali dianggap kurang tegas, lembek, dan pragmatis dalam menghadapi persoalan umat. Bahkan sering kali, kalangan moderat dianggap terlalu permisif, hingga akhirnya dituduh lebih dekat dengan kalangan liberal.
- b. Masih adanya pandangan yang meragukan sejumlah komitmen kebangsaan, seperti Pancasila dan UUD 1945. Masih ada beberapa

kalangan yang sering kali mempertentangkan antara Islam dan Pancasila. Munculnya pandangan semacam ini sebetulnya berkaitan dengan masih belum tuntasnya soal hubungan antara agama dan negara. Bagi kalangan ultra konservatif, agama Islam dianggap syamil mutakammil (sempurna dan serba mencakup). Pandangan seperti ini kerap kali menyatakan bahwa bentuk negara Islam merupakan bentuk yang tepat sesuai dengan ajaran agama. Padahal, banyak pakar mengatakan bahwa bentuk negara dan persoalan siyasah merupakan persoalan ijtihadi yang bisa ditentukan sendiri oleh umat Islam. Tidak ada pembakuan bentuk pemerintahan dalam Islam. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim bukanlah negara yang teokratis yang menjadikan hukum negara berasal dari agama tertentu. Bukan pula negara sekuler yang memisahkan urusan agama dengan negara. Indonesia memilih menjadi negara kebangsaan dengan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya.

- c. Diskursus moderasi beragama terkadang hanya berhenti di kalangan elite dan belum tersosialisasikan secara massif di kalangan *grass root*. Dalam kegiatan hubungan antar agama, misalnya mengenai tema "toleransi" yang seringkali sudah selesai di tingkat elite, tetapi belum tuntas di kalangan "bawah". Seperti pada kegiatan *interfaith* dialog, peserta yang hadir rata-rata sudah memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya membangun hubungan baik antar agama. Sementara konsep yang sama terkadang belum mampu menyentuh di kalangan kelompok pengajian kecil, dan masyarakat kecil.
- d. Penguatan politik identitas berbasis agama. Pada ranah politik praktis, agama kerap diseret untuk kepentingan mengeruk keuntungan bagi sebagian pihak. Penguatan politik identitas pada kontestasi politik sering memanfaatkan isu agama. Penguatan identitas berbasis agama beriringan dengan identitas lainnya, biasanya dipakai para politisi untuk memupuk solidaritas pendukung. Harapannya hanya satu peningkatan suara pemilih. Kondisi ini jelas mengancam kultur demokratis masyarakat sekaligus mengancam kelangsungan moderasi agama.

Di luar faktor internal tersebut, sejumlah faktor eksternal juga ikut berpengaruh dan menjadi tantangan tersendiri bagi implementasi moderasi beragama. Adanya ketidakadilan, baik pada skala nasional maupun global yang menimpa umat Islam, ketimpangan ekonomi, rendahnya kesejahteraan, hingga kemiskinan yang masih menjadi permasalahan umat, akan menjadi pemantik munculnya gerakan ekstremisme keagamaan. Demikian halnya dengan persoalan diskriminasi. Belum terbebasnya umat Islam dari tindakan diskriminatif juga potensial untuk memunculkan kelompok hard liner (garis keras).

Sebagaimana kita ketahui bahwa agama seperti halnya ideologi pembebasan lainnya, sering hadir menjadi faktor pendorong lahirnya gerakan sosial. Gerakan

sosial yang membela mereka yang teraniaya, terdiskriminasi, terpinggirkan oleh penguasa maupun oleh konstelasi politik yang tidak baik. Keberpihakan terhadap kelompok termarginalkan atau kelompok *mustadh'afin* (tertindas/lemah) merupakan visi sosial awal agama-agama termasuk Islam. Kekalahan strategi diplomasi dan kekurangan persenjataan sering memicu rasa putus asa dari para pejuang-pejuang Islam. Hingga akhirnya membangkitkan resistansi tak terkendali dari kelompok garis keras untuk berjuang membebaskan mereka yang tertindas. [5]

2. Peluang Penerapan Moderasi Beragama di Indonesia

Di tengah tantangan yang dihadapi dalam menerapkan moderasi beragama, terdapat banyak peluang dalam penerapan moderasi beragama di Indonesia. Salah satu peluangnya adalah adanya kesadaran yang semakin tinggi tentang pentingnya moderasi beragama sebagai kunci untuk mempertahankan harmoni dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Sebagai bangsa yang cerdas dan berbudaya luas harus mampu memahami bahwa moderasi beragama merupakan sebuah esensi dari ajaran Islam yang menghargai keragaman dan keberagaman. Hal ini akan menginspirasi untuk mampu mempraktikkan nilai-nilai moderasi agama dalam setiap aspek dalam kehidupan.

Selain itu, saat ini masyarakat Indonesia sudah memiliki akses yang lebih mudah ke sumber daya dan informasi yang dapat memperkaya pengetahuan mereka mengenai agama dan budaya lain. Dengan memanfaatkan akses ini, masyarakat Indonesia dapat memperkaya wawasan dan pemahaman mengenai agama dan budaya lain, sehingga akan lebih mudah untuk memahami perbedaan dan menerima perbedaan tersebut. Selain itu, masyarakat Indonesia juga dapat mempraktikkan nilai-nilai moderasi beragama dalam interaksi sehari-hari, baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim.

Dengan kesadaran mengenai pentingnya membangun moderasi beragama juga menjadi peluang bagi masyarakat Indonesia untuk memperkuat peran mereka dalam mempraktikkan dan mengembangkan moderasi beragama. Sehingga seluruh masyarakat sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan yang membawa misi moderasi beragama ke dalam kehidupan seharihari sehingga dapat membangun semangat toleransi dan dialog serta kerukunan antaragama. Dengan cara ini, masyarakat dapat berkontribusi secara positif dalam memperkuat harmoni antar umat beragama di Indonesia.

Peluang lainnya berasal dari dukungan lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan untuk membangun kesadaran dan pemahaman mengenai moderasi beragama di kalangan masyarakat luas. Dukungan dari lembaga dan organisasi ini dapat diwujudkan melalui pelatihan, seminar, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai moderasi beragama. Selain itu, lembaga-lembaga dan organisasi ini dapat

membantu mengembangkan kemampuan sosial dan kepemimpinan yang diperlukan dalam mempraktikkan dan mengembangkan moderasi beragama.[17]

E. Mengaktualisasikan Moderasi Beragama melalui Lembaga Pendidikan

Pendidikan sangat berperan penting dalam membangun sikap toleransi antar umat beragama, karena pendidikan dapat membentuk akhlak serta moral dalam diri manusia, pendidikan menjadi gerbang dalam membentuk karakter manusia, lembaga pendidikan yang dapat mengajarkan, serta membina manusia disebut dengan sekolah. Sekolah yang terdiri dari beberapa pengajar yang sudah kompeten dibidangnya yang dapat dipercayai dalam membangun dan mendidik manusia yang bijak dan pandai menghargai antar sesama.

Sekolah yang merupakan lembaga pendidikan formal memiliki siswa yang berlatar belakang berbeda-beda sehingga perbedaan menumbuhkan sikap kesadaran dalam diri seseorang untuk saling menghargai. Pengembangan sikap toleransi di sekolah dapat melalui proses pembelajaran keagamaan yang diterapkan untuk membentuk sikap hormat menghormati dan kerja sama yang baik antara sesama agar terciptanya lingkungan yang toleran dan mewujudkan harmonisasi serta kerukunan antar umat beragama.[18]

Untuk menerapkan konsep moderasi dalam konteks nyata di Indonesia, langkah-langkah berikut dapat diambil: Pertama, menjadikan lembaga pendidikan sebagai tempat percobaan konsep moderasi beragama. Lembaga pendidikan sangat cocok sebagai tempat untuk mengembangkan dan menguji konsep moderasi agama. Indonesia memiliki keragaman suku dan agama yang telah diakui. Meskipun negara ini memiliki kekhasan yang unik, juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tindakan strategis yang dapat diambil adalah: 1) Menyelipkan pemikiran moderasi agama dalam perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); 2) Mengikutsertakan lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah, dan lembaga non-formal lainnya untuk menguatkan nilai-nilai kemanusiaan, kerukunan beragama, dan konsep moderasi agama; 3) Mengembangkan pemahaman tentang keberagaman (religious literacy) dan pendidikan yang mendorong pemahaman antaragama (interfaith education); 4) Sekolah-sekolah perlu mendorong pengalaman beragama yang berbeda untuk membina kerjasama antaragama. Kedua, pendekatan yang berfokus pada rekonsiliasi dua kelompok yang ekstrem, mengupayakan perdamaian antara kelompok yang disebut ekstrem kanan (fundamentalis) dan eksrem kiri (liberalsekuler). Ketiga, mengadopsi pendekatan sosio-religius dalam beragama dan bernegara sebagai bagian dari moderasi.[19]

Beberapa contoh pelaksanaan moderasi dalam lembaga pendidikan Islam di sini. Dalam perspektif konseptual, Dakir dan Anwar mengemukakan bahwa pesantren memiliki pengaruh yang signifikan dalam konteks sosial karena berfungsi sebagai salah satu penjaga moral dalam sistem pendidikan Indonesia.

Pesantren turut berperan dalam memupuk nilai-nilai sosial, seperti kearifan lokal, yang menjadi sub-kultur dalam tradisi pesantren. Proses internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dipercaya mampu menjadi dasar dalam menjaga moderasi beragama di Indonesia, melalui langkah-langkah berikut. Pertama, menciptakan kesadaran individu untuk menyatukan sistem nilai sosial agama, termasuk kepercayaan pada Tuhan, semangat persaudaraan, keadilan, dan toleransi, dalam kurikulum sebagai elemen pengendalian budaya dalam pendidikan Islam yang moderat. Kedua, membiasakan nilai-nilai sosial pesantren sebagai fondasi dalam membangun pandangan keagamaan yang moderat. Ketiga, mengubah pendekatan pendidikan Islam dari orientasi indoktrinatif menjadi partisipatif, dengan memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Landasan konseptual pendidikan Islam yang moderat dapat dicapai dengan mengalihkan nilai-nilai sosial dan mengikuti prinsip-prinsip kebersamaan (ijtima'iyyah), musyawarah (syura), toleransi (tasamuh), keadilan ('adalah), menuju pembebasan sosial (taharrur), guna mewujudkan sikap beragama yang santun (tasamuh, tawasut, i'tidal), membangun ikatan ukhuwah islamiyyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah sesuai dengan visi Islam sebagai rahmat bagi alam semesta.

Beberapa pesantren salaf di Indonesia sudah mulai menjalankan praktik moderasi beragama ini. Sebut saja Pesantren al-Anwar yang berada di Sarang Rembang Jawa Tengah. Moderasi beragama diimplementasikan melalui sikap dan perilaku moderat para santri dalam menghadapi berbagai pernasalahan berkaitan dengan keagamaan dan juga sosial kemasyarakatan. Perilaku ini berhasil muncul sebagai hasil dari didikan pesantren dalam menanamkan karakter dan kepribadian santri yang berkesadaran diri untuk memiliki keilmuan yang baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat. Di samping itu, para santri juga tetap mendapatkan pendidikan terkait dengan prinsip kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan UUD 1945.[20] Peran pesantren dalam mengembangkan semangat moderasi beragama melalui revitalisasi manajemen pondok pesantren diharapkan dapat mempersempit ruang bagi munculnya paham radikal.[21]

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) juga menunjukkan peran serupa terkait dengan implementasi terhadap moderasi beragama. Implementasi moderasi beragama ini diwujudkan melalui penyempurnaan struktur kurikulum, evaluasi hasil pembelajaran, penyebarluasan materi melalui narasi-narasi keagamaan di platform digital, serta penerapan *Problem-Based Learning* (PBL) dalam konteks ruang kelas. Perbaikan terhadap kurikulum di PTKI ini dilakukan melalui penyatuan dan penanaman aspek keilmuan, pengembangan pengetahuan teologi dengan panduan pada Islam sebagai sumber kasih dan keberkahan bagi seluruh makhluk, penguatan pada nilai-nilai lokal yang berharga, pembangunan kurikulum untuk menanggulangi radikalisme, penyelarasan nilai-nilai pluralitas

dalam kurikulum, penyusunan metode dan penilaian pembelajaran yang berfokus pada perspektif multikultural, dan penyelenggaraan program pendampingan untuk membentuk kepribadian Muslim yang holistik, tidak hanya sebagai institusi yang mentransfer pengetahuan tetapi juga membentuk etika yang luhur.

Implementasi moderasi beragama juga dilakukan oleh lembaga Madrasah. Praktik baik madrasah dalam implementasi moderasi beragama dilakukan melalui kegiatan pembelajaran intrakulikuler dan ekstrakulikuler dengan menekankan pada nilai-nilai moderasi beragama. Hal ini dapat ditemukan misalnya pada kisah keteladanan para walisongo dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Peran paling signifikan dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama melalui dunia pendidikan yang menyatukan pemahaman tentang agama dan nasionalisme kebangsaan dimiliki oleh para pendidik. Selain itu, pendidik juga berperan dalam memberikan ruang bagi siswa untuk mampu berpikir secara kritis. Dalam lingkup kelembagaan, implementasi moderasi beragama dapat dilakukan melalui pengembangan budaya madrasah, baik itu *material culture* dengan pengkondisian lingkungan fisik maupun *behavior culture* melalui pengembangan budaya yang mengembangkan nilai-nilai moderasi melalui struktur madrasah.[22]

Pelaksanaan moderasi beragama dalam institusi pendidikan tinggi dapat diwujudkan melalui integrasi nilai-nilai moderasi ke dalam kurikulum yang sudah ada. Konten pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa, keahlian pengajar, dan dukungan lingkungan kampus. Penginternalisasian nilai-nilai ini bisa dilakukan melalui berbagai metode seperti kuliah tatap muka, sesi tutorial, seminar, dan bentuk interaksi lainnya. Proses penilaian kemajuan dalam pemahaman terkait dengan moderasi dapat dilakukan dengan melakukan screening melalui komunikasi yang bersifat lisan atau tulisan, dan hasilnya dapat secara berkala disampaikan oleh para dosen atau tutor.[23]

Sedangkan implementasi moderasi beragama di sekolah dapat dilihat pada kurikulum yang digunakan. Walaupun masih terbatas pada ranah konseptual, kurikulum 2013 memiliki muatan ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Muatan ideologi Pancasila ini terkandung dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam, baik eksplisit maupun implisit. Maraknya ideologi transnasional yang berusaha menginfiltrasi lembaga pendidikan menjadi ancaman serius dan tentu saja tidak sesuai dengan Pancasila. Di sinilah peran strategis Pendidikan Agama Islam dalam membendung masuknya arus ideologi keagamaan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dengan cara menguatkan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam yang wasathiyyah dan diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menambahkan nilai-nilai moderasi beragama dalam program sekolah dan proses pembelajaran atau melalui scholl culture maupun classroom culture.[24]

KESIMPULAN

Dalam masyarakat yang pluralis seperti Indonesia, moderasi beragama memiliki peranan penting dalam membangun dan mempertahankan toleransi serta kerukunan antara berbagai kelompok agama dan kepercayaan. Tulisan ini telah mengupas secara mendalam mengenai pentingnya moderasi beragama sebagai landasan utama dalam mencapai tujuan tersebut.

Moderasi beragama melibatkan pendekatan yang seimbang dan berkeadilan terhadap prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai budaya, sambil menghormati hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Dengan mengadopsi pandangan ini, masyarakat dapat menghindari ekstremisme dan intoleransi yang dapat merusak harmoni sosial. Salah satu kunci dari moderasi beragama adalah pendidikan yang inklusif dan berfokus pada nilai-nilai persamaan, menghargai perbedaan, dan promosi dialog antaragama. Pendidikan semacam ini akan membentuk generasi muda yang lebih terbuka pikirannya, mampu mengenali nilai-nilai bersama, dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai agama-agama lain.

Selain itu, peran pemimpin agama dan tokoh masyarakat dalam mempromosikan moderasi beragama sangatlah penting. Dengan memberikan teladan yang baik dan mengedepankan pesan-pesan toleransi serta kerukunan, pemimpin-pemimpin ini dapat membentuk budaya harmoni yang meresap dalam semua lapisan masyarakat. Pemerintah juga memegang peran kunci dalam memfasilitasi dan mempromosikan moderasi beragama melalui kebijakan yang inklusif dan adil. Langkah-langkah seperti mendukung dialog antaragama, melindungi hak-hak minoritas, dan menghukum tindakan intoleransi akan membantu membangun lingkungan yang lebih aman dan damai bagi semua warga negara.

Dalam menghadapi tantangan global seperti radikalisme dan ekstremisme, moderasi beragama adalah instrumen efektif untuk melawan penyebaran ideologi-ideologi berbahaya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama, masyarakat Indonesia dapat membangun pagar kokoh yang melindungi kedamaian dan kesatuan. Kesimpulannya, moderasi beragama bukan hanya sekadar konsep, tetapi juga suatu pendekatan yang nyata dan berdampak dalam mewujudkan toleransi dan kerukunan dalam masyarakat yang pluralis. Dengan mengakui dan menghormati keragaman agama dan kepercayaan, serta berkomitmen untuk hidup bersama secara damai, Indonesia dapat terus menjadi contoh gemilang dalam menjaga harmoni sosial di tengah-tengah perbedaan.

Saran terhadap pengembangan tulisan dengan judul serupa dapat mengangkat mengenai peran teknologi dan media sosial dalam implementasi moderasi beragama. Penulis berikutnya dapat meninjau mengenai perkembangan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan dalam mempromosikan moderasi beragama dan menghadapi potensi penyebaran ekstremisme online. Lalu langkah apa saja yang dapat diambil untuk memastikan informasi yang disebarkan dalam

ruang digital mendukung nilai-nilai toleransi dan kerukunan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Lubis and B. H. Harahap, *Kehidupan Moderasi Beragama (Tinjauan Potensi Adat dan Budaya*). Bogor: Bypass, 2022.
- [2] B. A. Simanjuntak and S. Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- [3] A. Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif (Quantitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- [4] D. A. Rohman, *Moderasi Beragama: Dalam Bingkai Keislamanan di Indonesia*. Bandung: Lekkas, 2021.
- [5] A. Wijaya, *Berislam di Jalur Tengah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- [6] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- [7] Syahidin and dkk, Moral dan Kognisi Islam. Bandung: Alfabeta, 2009.
- [8] A. M. D. Faza, *Moderasi Beragama Para Sufi*. Medan: Merdeka Kreasi, 2022.
- [9] Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'anulkarim Al-Mubayyin Tematik*. Bandung: PT alQosbah Karya Indonesia, 2022.
- [10] "https://hadits.in/muslim/2489."
- [11] "https://hadits.in/nasai/3007."
- [12] S. M. Harahap, F. A. Siregar, and D. Harahap, *Nilai-Nilai dan Praktik Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Sumatera Utara*. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
- [13] A. Muhtarom and T. Latief, *Moderasi Beragama: Konsep, Nilai, dan Strategi Pengembangannya di Pesantren*. Jakarta Selatan: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020.
- [14] H. Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 1995.
- [15] M. Japar, S. Syarifa, and D. N. Fadhillah, *Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- [16] Y. Huriani, E. Zulaiha, and R. Dilawati, *Buku Saku Moderasi Beragama untuk Perempuan Muslim*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2022.
- [17] I. Kanafi *et al., Kecenderungan Keberagaman Aktivis Mahasiswa PTKIN se-Jawa Tengah: Antara Radikal, Moderat, dan Liberal.* Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023.
- [18] R. K. Sari *et al.*, *Merawat Sikap Toleransi Beragama Di Tengah Masyarakat Majemuk*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- [19] E. Sutrisno, Bunga Rampai Moderasi Beragama di Indonesia. Guepedia, 2022.
- [20] Dakir and H. Anwar, "Nilai-Nilai Pendidikan Pesantren Sebagai Core Value dalam Menjaga Moderasi Islam di Indonesia," *J. Islam Nusant.*, vol. 03, no. 2, pp. 495–517, 2019.
- [21] I. Fathurrochman, D. H. Ristianti, and M. A. S. bin M. Arif, "Revitalization of Islamic Boarding School Management to Foster the Spirit of Islamic Moderation in Indonesia," *Islam. Educ. Southeast Asia*, vol. 8, no. 2, pp. 239–258, 2019.
- [22] A. Faozan, Wacana Intoleransi dan Radikalisme dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam. Serang: A-Empat, 2022.

- [23] Y. Purwanto, Qowaid, L. Ma'rifataini, and R. Fauzi, "INTERNALISASI NILAI MODERASI MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI PERGURUAN TINGGI UMUM," *EDUKASI J. Penelit. Pendidik. Agamadan Keagamaan*, vol. 17, no. 2, pp. 110–124, 2019.
- [24] M. Marbawi, *Ideologi Pendidikan: Studi Penguatan Pancasila Pasca Oder Baru Melalui Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Tangerang: Cinta Buku Media, 2019.